

## MENINGKATKAN TRANSPARANSI PADA INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS: OPENTENDER.NET)

Robby Abdul Malik, Nicky Dharmawan Kosasih, Kristian Widya Wicaksono

*Universitas Katolik Parahyangan, Administrasi Publik Departemen E-mail:  
abdulmalikrobby@yahoo.co.id , nicky\_dharmawan@rocketmail.com ,  
widya.wicaksono@gmail.com*

### Abstrak

Keterbukaan organisasi pemerintah kepada masyarakat adalah suatu keharusan dalam proses demokratisasi. Keterbukaan organisasi pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari lembaga independen sebagai bentuk keterlibatan pihak ketiga sesuai dengan semangat re-inventing pemerintah. Di Indonesia, dua lembaga independen yang bekerja sama -ICW dan upaya LKPP- untuk mendorong pemerintah untuk lebih terbuka kepada publik dalam hal pemanfaatan anggaran. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan situs opentender.net. Namun, dalam prakteknya, situs opentender.net berisi informasi tentang pagu anggaran saja. Informasi tersebut tidak menginformasikan rincian penggunaan anggaran. Meskipun berkaitan erat dengan transparansi. The method for mengembangkan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian menggunakan studi kasus di opentender.net situs yang disediakan oleh ICW bekerjasama dengan LKPP. Pengumpulan data dilakukan dengan: studi dokumen, survei literatur dan observasi dari laporan media yang relevan dengan isu-isu transparansi informasi publik. Berdasarkan hasil studi tentang transparansi di situs opentender.net dapat disimpulkan bahwa situs tersebut kurang dalam menyajikan informasi rinci tentang HPS dan nilai kontrak kepada publik. Kurangnya informasi membuat informasi tersebut sulit untuk mencari tahu apakah nilai kontrak yang telah disetujui sepenuhnya bebas dari korupsi. Meskipun ada perbedaan antara HPS dengan nilai kontrak, itu tidak menjamin bahwa proses tender yang bersih seratus persen. Asumsinya adalah bahwa antara pemerintah dan perusahaan tertentu dapat membuat kesepakatan di bawah meja untuk menentukan nilai kontrak yang lebih rendah dari HPS. Namun, pada kenyataannya mungkin ada perusahaan lain yang dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah didukung dengan kualitas yang lebih baik.

**Kata kunci:** Transparansi, opentender.net, korupsi, barang dan jasa penyediaan

### pengantar

Barang dan jasa penyediaan adalah program yang diperlukan untuk institusi manapun, apakah itu milik swasta milik negara atau. Program ini bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan biaya akuntabel dan kuantitas yang tepat dan kualitas, dan barang-barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang tepat. Di lembaga pemerintah, penyediaan barang dan jasa adalah bentuk implementasi dari negara

anggaran belanja (Anggaran Pendapatan Belanja Negara / APBN) dan daerah anggaran belanja (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD). Pada akhirnya, penyediaan barang dan jasa adalah program di lembaga pemerintah yang mempengaruhi proses pembangunan nasional.

Dalam setiap penyediaan barang dan jasa, pemerintah seharusnya bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena setiap program pemerintah adalah manifestasi dari poin rinci dari anggaran negara. Dalam struktur APBN, pendapatan negara terbesar berasal dari pajak dari orang-orang. Menurut 2015 APBN, pendapatan negara dari pajak adalah Rp 1,201.7 triliun dari total pendapatan negara Rp 1,793.6 triliun atau sekitar 67 persen dari pendapatan negara secara keseluruhan (<http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015> , diakses pada 18/09/2015 di 15,07). Oleh karena itu, adalah

kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan mengenai anggaran yang dihabiskan untuk menyediakan barang dan jasa.

Transparansi mengacu pada akses tak terkekang oleh masyarakat untuk informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan pada keputusan dan kinerja di sektor publik (Armstrong, 2005). Transparansi merupakan persyaratan utama dari sistem pengadaan publik modern. Ini memberikan kepada informasi publik mengenai, dan akses ke hukum, peraturan, kebijakan dan praktek pengadaan oleh agencies. Lack pemerintah transparansi dalam kegiatan pengadaan dapat menjadi sumber kegiatan yang tidak sehat seperti korupsi, skandal dan penyalahgunaan sumber daya publik (Shu, HW, Othman R., Omar H., N., Abdul R.,

R., & Husna, H., N. 2011).

Transparansi dalam pengadaan publik adalah tentang informasi. Akses ke informasi pengadaan kunci dengan masyarakat sipil, media dan pemangku kepentingan lainnya, dan cara-cara di mana ini dapat menggunakan informasi tersebut, langsung mempengaruhi akuntabilitas (UNDP, 2010). Transparansi dianggap sebagai salah satu pencegah yang paling efektif untuk korupsi dan pra-kondisi untuk memastikan pejabat publik akuntabilitas (OECD, 2007).

Jelas dan dokumen penawaran yang komprehensif, dan kontrak, sangat penting untuk transparansi dalam proses pengadaan. Sebuah proses pengadaan yang transparan memerlukan tindakan legislatif dan administratif seperti proses transparan, perlindungan terhadap korupsi, prosedur prakualifikasi yang adil dan pemilihan transparan dari pemenang (ADB / OECD, 2006) penawar. Publikasi rencana pengadaan tahunan entitas pengadaan juga merupakan ukuran transparansi penting, serta penyebaran daftar informasi mengenai dan pendaftar dari pemasok, dan prosedur untuk mengajukan permohonan pendaftaran. transparansi tindakan lain yang relevan meliputi: prosedur penawaran terbuka; pengungkapan yang cepat dari hasil penawaran, yaitu, pemberitahuan prompt untuk sukses serta penawar berhasil; publikasi rencana pengadaan tahunan; tawaran menantang sistem; melibatkan sektor swasta dalam proses pengadaan; menjaga lengkap dan catatan yang memadai dari kegiatan pengadaan.

Menurut Krina (2003) indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Mengembangkan mekanisme pengaduan jika ada aturan yang dilanggar atau suap
3. nyaman akses ke informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan pers dan organisasi non-pemerintah.

Namun, dalam prakteknya, penyediaan barang dan jasa dipandang sebagai cara untuk korup. Panitia pengadaan barang dan jasa sering menggunakan momen ini untuk mencapai keuntungan pribadi dan keuntungan. Contoh dari tindakan ini adalah dengan menandai anggaran untuk penyediaan barang dan jasa. Menurut Direktur Program Pengadaan Indonesia Watch, Hayie Muhammad, 70 persen korupsi

kasus adalah disebabkan oleh itu barang dan layanan ketentuan proyek (Http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/05/mnwbsz-70-persen-kasus-korupsi-diindonesia-dari-barang-dan-jasa, diakses pada 18/09 / 2015 14,42). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang tepat dari pemerintah sendiri. Dengan demikian, apa yang telah diharapkan oleh pemerintah tidak pernah menghasilkan fakta yang sesuai.

Masalah ini sangat penting dan harus dikontrol segera. Penyediaan barang dan jasa harus diubah dan diawasi oleh pihak independen, misalnya, Indonesian Corruption Perhisan / ICW atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Upaya yang dapat dilakukan oleh partai-partai independen adalah dengan menciptakan opentender.net website, dengan website ini, diharapkan penyediaan barang dan jasa dapat lebih transparan dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik bagi pemerintah.

## Diskusi

### Apa opentender.net?

Opentender.net adalah sebuah situs web pada pengawasan berbasis elektronik pelaksanaan penyediaan barang dan jasa (e-procurement) yang didirikan dan diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch / ICW bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa / LKPP dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia / IAPI oleh kesepakatan di Amou pada tahun 2013. Opentender.net ini diselenggarakan oleh ICW menggunakan data pada lelang elektronik yang dikumpulkan dari LKPP. Kemudian, ICW memproses data untuk gambar probabilitas korupsi dan memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk tabel sesuai dengan potensi analisis penipuan metode / PFA.

Sampai dengan saat ini, e-procurement dianggap sebagai solusi alternatif untuk penyediaan barang dan jasa konvensional yang tidak bisa memenuhi permintaan untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha. Dengan e-procurement, menuntut kriteria seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, waktu dan penghematan anggaran, dan pencegahan korupsi terpenuhi. Namun, penggunaan e-procurement masih membutuhkan pengawasan, dan itu adalah tujuan dari penciptaan opentender.net: untuk mengawasi penyediaan barang dan jasa melalui e-procurement. Dengan opentender.net, diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kenaikan barang dan jasa penyediaan dan barang reformasi dan penyediaan jasa untuk online. Pada akhirnya,

Moto opentender.net adalah "Open lembut, mencegah korupsi." Dari motto itu, penulis dapat memahami bahwa website ini dibuat untuk memberikan informasi terbuka untuk umum tentang lelang elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apa yang pemerintah lakukan dengan uang yang didapat dari orang-orang. Singkatnya, opentender.net adalah alat berbasis web untuk mengawasi pelaksanaan e-procurement yang dapat digunakan oleh masyarakat melalui organisasi sipil atau inspektorat untuk mengawasi penyediaan barang dan jasa.

### Kriteria yang digunakan oleh opentender.net untuk mengawasi e-procurement

Organisasi sipil (Organisasi Masyarakat Sipil / OMS) dan inspektorat yang ingin mengawasi menggunakan opentender.net akan diberikan teknik investigasi yang akan berguna untuk mengetahui bagaimana untuk menyelidiki proyek barang dan jasa penyediaan yang diduga korup. Dalam teknik investigasi, beberapa kriteria akan diberikan untuk mempertimbangkan apakah lelang oleh pemerintah korup atau tidak.

Beberapa kriteria yang diberikan untuk teknik penyelidikan termasuk (Indonesian Corruption Watch, Darurat pengadaan BARANG DAN JASA, Slide 21, 2013):

#### 1. Nilai kontrak yang terlalu tinggi

Sebesar kontrak yang tinggi berpotensi untuk menarik perusahaan untuk menyerahkan proyek tertentu. Seperti jika jumlah kontrak terlalu tinggi, pengusaha cenderung berpikir bahwa proyek mungkin menghasilkan keuntungan hugfe. Dari persepsi ini, para peserta cenderung melakukan apa saja untuk memenangkan lelang, termasuk pelanggaran hukum.

Untuk mengukur jumlah proyek, seseorang dapat menggunakan sistem skala, misalnya, di atas Rp 5 miliar. Oleh karena itu, perlu untuk mengawasi proyek-proyek besar karena sangat berisiko untuk menjadi cara untuk korup.

#### 2. Hanya ada beberapa peserta

Sistem lelang elektronik bertujuan untuk menghapus hambatan teritorial. Ini berarti bahwa penyediaan barang elektronik dan jasa dimaksudkan untuk diikuti oleh semua orang di setiap wilayah di Indonesia. Jika hanya ada sejumlah perusahaan dan peserta, yang dimonopoli oleh perusahaan dan masing-masing lembut milik perusahaan yang sama, maka lelang curiga bahwa telah dimanipulasi atau menggunakan strategi turn-shift.

### 3. menang berulang-ulang

Jika sebuah perusahaan menang projects repetitively di setiap tawaran, maka pengawas harus memiliki kecurigaan pada pencapaian perusahaan atau karena ada hubungan keluarga atau pandangan politik bersama antara pengusaha di perusahaan.

### 4. Kontrak untuk proyek konstruksi milik kuartal IV-tahun

**Siklus anggaran negara dan daerah dikelola dalam satu tahun anggaran mulai dari 1<sup>st</sup> dari Januari sampai 31<sup>st</sup> Desember.**

Jika setiap proyek konstruksi milik kuartal IV-tahun (yaitu mulai dari Oktober-Desember), maka diduga bahwa proyek mungkin rusak. Kehadiran tujuan siklus untuk merencanakan, belanja, dan bertanggung jawab atas anggaran dengan cara yang tepat bahwa penyerapan anggaran dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebaik itu bisa. Oleh karena itu, jika ada proyek konstruksi milik kuartal IV-tahun, kemungkinan adalah bahwa proyek sedang dimanipulasi atau pekerjaan untuk proyek tersebut tidak akan sesuai dengan siklus penganggaran ujungnya dengan Desember dan akan sulit untuk bekerja pada konstruksi proyek di hanya seperempat tahun.

### 5. Sebuah jumlah sedikit menghemat jumlah kontrak Rp 100 miliar

Ada beberapa komponen yang harus diketahui dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apakah konvensional atau elektronik. Yang pertama adalah alokasi anggaran, yang merupakan jumlah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk kontrak. Hal kedua adalah perkiraan jumlah biaya sebelum pemerintah mempunyai kontrak dengan perusahaan. Yang ketiga adalah anggaran berdasarkan pada kontak yang tetap melalui kesepakatan antara pemerintah dan lelang peserta.

Jumlah sum kontrak harus lebih rendah dari alokasi anggaran dan perkiraan biaya karena jumlah kontrak dengan terendah dan paling proporsional tawaran akan memenangkan tender atau lelang. Dengan demikian, semakin besar jumlah kontrak, semakin besar penghematan dan efisiensi anggaran yang diperoleh.

### Analisis Penipuan potensial sebagai metode untuk mengawasi

Data yang dikumpulkan oleh LKPP kemudian diolah dengan metode analisis penipuan potensial. Data diukur dengan lima kriteria yang disebutkan sebelumnya. Salah satu metode untuk mengukur data adalah dengan menggunakan matriks keputusan. Metode ini mungkin bisa membantu untuk memutuskan mana proyek korup. Dengan metode ini, satu akan mampu membuat keputusan yang proyek harus diprioritaskan untuk diteliti lebih lanjut untuk mengukur akuntabilitas. Di bawah pedoman untuk menggunakan metode ini untuk melakukan

proses pengawasan di itu implementasi dari e-procurement adalah disajikan  
([Http://opentender.net/content/database](http://opentender.net/content/database), diakses pada 18/09/2015 di 15.45):

#### • kontrak Sum

Kriteria	Sum di Rp	Skor diasumsikan
Tinggi Sum Contract	<p>&gt; 200 juta = 1</p> <p>201-500 million = 2</p> <p>501,000,000-1000000000 = 3</p> <p>1,01 miliar - 5 miliar = 4</p> <p>&gt; 5 miliar = 5</p>	5

skor 5 menunjukkan bahwa probabilitas untuk korupsi sangat tinggi. Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa semakin besar jumlah kontrak proyek, semakin tinggi risiko korupsi dalam proyek.

- Jumlah peserta yang menawarkan tawaran

Kriteria	Jumlah	skor diasumsikan
Nomor dari lembut peserta yang menawarkan tawaran	$<3 = 5$ $3 = 4$ $4 = 3$ $5 = 2$ $> 5 = 1$	5

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa sedikit peserta lelang, semakin besar skor, dengan demikian, semakin tinggi resiko korupsi di bahwa tender tertentu.

- Kontrak: Perkiraan Jumlah Biaya (Tabungan) (S)

Kriteria	Skor	skor diasumsikan
Kontrak: Perkiraan Jumlah Biaya (Tabungan) (S)	$> 95,01\% = 5$ $90,01\% - 95\% = 4$ $85,01\% - 90\% = 3$ $80,01\% - 85\% = 2 < 80\%$ $= 1$	5

Dapat disimpulkan dari tabel bahwa menurunkan penghematan dalam lelang proyek, lebih rendah skornya. Oleh karena itu, semakin tinggi penghematan dalam sebuah proyek, semakin tinggi risiko korupsi dalam proyek itu.

- Waktu yang dihabiskan di kerja konstruksi (Q)

Kriteria	Skor	skor diasumsikan
Waktu yang dihabiskan di kerja konstruksi	$Q1 = 0$ $Q2 = 0$ $Q3 = 0$ $Q4 = 1$	5

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kerja konstruksi yang dihabiskan selama kuartal keempat tahun, maka risiko korupsi lebih besar. Hal ini dapat diamati sebagai skor untuk kerja selama tiga perempat tahun pertama adalah 0, sedangkan untuk yang terakhir kuartal tahun skor adalah 1.

- Pemenang berulang-ulang

Kriteria	Skor	Skor diasumsikan
Pemenang berulang-ulang	$W = 2x = 1$ $W = 3x = 2$ $W = 4x = 3$ $W = 5x = 4$	5

Hal ini dapat diamati bahwa jika sebuah perusahaan menang tender lima kali berturut-turut dalam lelang penyediaan barang dan jasa, maka skor ini 4. Hal ini dapat diamati bahwa semakin tinggi skor, semakin tinggi potensi korupsi pada proyek itu.

Kemudian, hasil pengukuran dari lima kriteria dijumlahkan dan satu akan mengukur jumlah akhir oleh skala 1-20, di mana skor 1 menunjukkan probabilitas rendah korupsi sedangkan skor 20 menunjukkan probabilitas tinggi korupsi .

Bahkan, opentender.net terbukti cukup efektif dalam mengidentifikasi perilaku dalam penyediaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh penggunaan skala 1-20 yang memudahkan pengguna website untuk memutuskan kecenderungan korupsi dalam barang dan jasa proyek penyediaan. Opentender.net juga bisa menjadi instrumen untuk meminimalkan penggunaan dan mencegah kekerasan atas barang dan penyediaan layanan oleh organisasi sipil atau dengan inspektorat. Pada akhirnya, opentender.net dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kecurigaan tentang korupsi dalam penyediaan barang dan jasa.

### **Kelemahan dari opentender.net**

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa opentender.net memiliki banyak keuntungan bagi penggunaanya. Namun, di sisi lain, opentender.net juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa informasi rinci tentang perencanaan anggaran, perkiraan jumlah biaya yang dibuat oleh pemerintah, dan menyetujui kontrak tidak tersedia untuk ditampilkan. Akan sulit untuk informasi pencari tahu persis di mana bagian akan ada perbedaan harga dalam perkiraan jumlah biaya dan dalam kontrak. Selain itu, biaya pasar tidak tersedia juga. Ini akan membuat informasi pencari mengalami kesulitan dalam membandingkan harga antara perkiraan jumlah biaya, biaya kontrak, dan biaya pasar.

Opentender.net hanya menyatakan biaya keseluruhan yang tersedia, perkiraan jumlah biaya, dan biaya kontrak. Namun, dalam rangka untuk mengungkapkan apakah ada korupsi atau tidak, lebih lanjut dan penyelidikan lebih dalam harus dilakukan pada perkiraan jumlah rinci biaya dan biaya kontrak. penyelidikan lebih lanjut atas dokumen terkait perjanjian antara pemerintah dan perusahaan juga perlu dilakukan. Jika informasi yang tersedia hanya menyangkut jumlah kontrak, maka skor akuntabilitas akan rendah. akuntabilitas akan tergantung hanya pada jumlah akhir dari kontrak yang disetujui dan tidak termasuk penganggaran rinci yang mungkin telah ditandai.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil studi tentang transparansi di situs opentender.net dapat disimpulkan bahwa situs tersebut kurang dalam menyajikan informasi rinci tentang HPS dan nilai kontrak kepada publik. Kurangnya informasi membuat informasi tersebut sulit untuk mencari tahu apakah nilai kontrak yang telah disetujui sepenuhnya bebas dari korupsi. Meskipun ada perbedaan antara HPS dengan nilai kontrak, itu tidak menjamin bahwa proses tender yang bersih seratus persen. Asumsinya adalah bahwa antara pemerintah dan perusahaan tertentu dapat membuat kesepakatan di bawah meja untuk menentukan nilai kontrak yang lebih rendah dari HPS. Namun, pada kenyataannya mungkin ada perusahaan lain yang dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah didukung dengan kualitas yang lebih baik.

### **Referensi**

Krina, P. (2003). "Indikator Dan alat ukur Prinsip akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi". Jakarta:

**Sekretariat Tata Kelola Publik. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.**

OECD (2007). "Integritas dalam Pengadaan Publik: Good Practices dari A sampai Z". Paris, Prancis

- Shu, HW, Othman R., Omar H., N., Abdul R., R., & Husna, H., N. (2011). "Masalah Pengadaan di Malaysia." *International Journal of Manajemen Sektor Publik*, 24 (6). pp 567-593.
- Asian Development Bank / OECD (2006). *Membatasi Korupsi di Pengadaan Publik di Asia dan Pasifik. Kemajuan dan Tantangan di 25 Negara*. Anti Korupsi Initiative for Asia dan Pasifik. [Online]. Tersedia di [www.unpcdc.org](http://www.unpcdc.org). [Diperoleh September 20, 2015]
- Armstrong, E. (2005). *Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik: Terbaru Tren, Regional dan Perkembangan Internasional dan isu-isu Muncul*. [On line]. Tersedia di [www.google.com](http://www.google.com). [Diperoleh September 20, 2015]
- UNDP (2010). *Kapasitas Pengadaan Publik Pengembangan panduan*. [On line]. Tersedia di [www.unpcdc.org](http://www.unpcdc.org). [Diperoleh September 20, 2015]
- <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>, diakses pada 18/09/2015 di 15,07
- <http://opentender.net/content/database>, diakses pada 18/09/2015 di 15.45
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/05/mnwbsz-70-persen-kasus-korupsi-di-Indonesia-dari-barang-dan-jasa>, diakses pada 18/09/2015 di 14,42